



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BIDANG FISIK PRASARANA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun perencanaan tugas pelayanan publik Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pedoman kegiatan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Fisik Prasarana Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG FISIK PRASARANA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

BAB II

PERIODE DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah bidang fisik prasarana tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah bidang fisik prasarana tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2022
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
BIDANG FISIK PRASARANA
TAHUN 2023



RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERMUKIMAN RAKYAT
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dokumen Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen daerah lainnya baik RPJMD, maupun RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra OPD, dan RPJMD, serta RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Pendahuluan I – 3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 70).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 adalah ;

1. Sebagai bagian tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah;
2. Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023;
3. Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023; dan
4. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- 1) Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.
- 7) Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum memiliki tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing – masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing – masing, dengan format tabel 2.2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah kabupaten / kota serta dengan Kementrian dan Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti NSPK, SPM, dan SGDs (Sustainable Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
- 5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai :

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
- 4) Lampirkan Tabel 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten / kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai :

- 1) Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya :
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - Pencapaian SDGs;
 - Pengentasan kemiskinan;
 - Pencapaian NSPK dan SPM;
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
 - Pengembangan daerah terisolir;
 - Dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antarlain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Memuat program beserta indikator keberhasilan serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.
- 4) Pada bagian terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dilakukan dengan melihat indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra periode tahun sebelumnya yakni Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penentuan IKK mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar. Selain itu, dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara lengkap rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/ kegiatan sampai dengan Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar disajikan dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

TABEL 2.1.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		172.312.475.000	533.560.547.000	195.528.362.000	162.985.949.129	83,36	126.148.846.000		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	24.493.960.000	15.102.623.000	20.821.749.310	20.114.100.979	96,60	18.343.910.000		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	785.000.000	3.352.938.000	509.247.000	483.786.250	95,00	133.762.000	3.970.486.250	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan serta terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN	19.518.094.000	51.683.667.000	19.433.094.000	15.699.542.508	80,79	16.342.220.000	16.342.220.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	130.000.000		156.750.000	134.716.000	85,94	150.000.000	418.478.000	
	Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Pendapatan Daerah	200.000.000	300.700.000	30.000.000	24.833.000	82,78	35.000.000	365.700.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	831.914.500	2.755.033.000	861.278.310	643.653.500	74,73	437.938.000	3.836.624.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.698.865.500	3.973.098.000	1.905.467.500	1.819.291.000	95,48	5.000.000	5.797.389.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terealisasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	756.800.000	1.799.975.000	815.640.000	734.427.358	90,04	737.430.000	3.721.832.358	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.286.000	2.921.679.000	568.636.500	528.496.181	92,94	361.000.000	3.811.175.181	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	15.524.222.000	38.067.079.000	16.433.370.000	12.487.501.500	75,99	6.939.386.000	57.493.966.500	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS)	200.000.000	950.000.000	330.000.000	321.803.250	97,52		1.271.803.250	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kabupaten	15.324.222.000	37.117.079.000	16.103.370.000	12.165.698.250	75,55	6.939.386.000	56.222.163.250	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan air bersih	15.094.214.000	48.856.422.000	14.652.196.500	13.840.602.491	94,46	15.830.432.000	78.527.456.491	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya penduduk atau rumah tangga, yang terhadap kebutuhan air bersih	15.094.214.000	48.856.422.000	14.652.196.500	13.840.602.491	94,46	15.830.432.000	78.527.456.491	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan IPAL	6.707.337.000	26.850.813.000	6.673.337.000	6.656.166.500	99,74	6.393.429.000		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya penduduk atau rumah tangga, terhadap jaringan IPAL	6.707.337.000	26.850.813.000	6.673.337.000	6.656.166.500	99,74	6.393.429.000	39.900.408.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Saluran dalam kondisi baik	0	24.520.000.000	0	0		0	24.520.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkulolanya system drainase perkotaan	0	24.520.000.000	0	0		0	24.520.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Laju Perkembangan luasan permukiman	1.200.000.000	9.572.686.000	1.975.000.000	1.940.190.050	98,24	820.000.000	11.513.696.050	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya pembangunan infrastruktur di kawasan strategis daerah	1.200.000.000	9.572.686.000	1.975.000.000	1.940.190.050	98,24	820.000.000	11.513.696.050	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memenuhi peraturan	69.410.000.000	124.473.999.000	94.894.041.000	73.505.784.185	77,46	32.850.000.000	230.829.783.185	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya perijinan bangunan Gedung	69.410.000.000	124.473.999.000	94.894.041.000	73.505.784.185	77,46	32.850.000.000	230.829.783.185	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penurunan lingkungan tidak sehat	0	0	0	0		0	0	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penataan bangunan gedung dan lingkungannya	0	0	0	0		0	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	33.722.919.000	240.110.660.000	33.747.185.190	28.488.810.874	84,42	39.779.774.000	308.379.244.874	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten	33.722.919.000	240.110.660.000	33.747.185.190	28.488.810.874	84,42	39.779.774.000	308.379.244.874	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penyedia jasa konstruksi yang baik (sehat)	225.000.000	0	131.660.000	101.285.600	76,93	95.000.000	196.285.600	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi terselenggara	200.000.000	0	100.000.000	69.705.600	69,71	70.000.000	139.705.600	
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang baik (sehat)	25.000.000	0	31.660.000	31.580.000	99,75	25.000.000	56.580.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukannya	1.541.360.000	3.301.500.000	1.596.360.000	1.422.409.770	89,10	494.960.000	5.218.869.770	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukannya	1.141.360.000	1.623.200.000	1.422.782.000	1.259.881.500	88,55	344.960.000	3.228.041.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukannya	50.000.000	1.678.300.000	0	0			1.678.300.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukannya	350.000.000		173.578.000	162.528.270	93,63	150.000.000	312.528.270	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	200.000.000	88.050.000	200.000.000	189.673.500	94,84	135.000.000	324.673.500	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		50.000.000		50.000.000	49.820.000	99,64	35.000.000	84.820.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		150.000.000	88.050.000	150.000.000	139.853.500	93,24	100.000.000	239.853.500	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan penataan permukiman	325.000.000	408.900.000	2.353.463.000	2.341.418.270	99,49	1.831.649.000	4.581.967.270	
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		250.000.000	85.000.000	230.000.000	225.200.270	97,91	40.000.000	350.200.270	
	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		75.000.000	323.900.000	2.123.463.000	2.116.218.000	99,66	1.791.649.000	4.231.767.000	
	PROGRAM PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pengurangan permukiman kumuh	2.093.436.000	154.124.000	25.000.000	21.874.000	87,50	1.260.000.000	1.435.998.000	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		2.093.436.000	154.124.000	25.000.000	21.874.000	87,50	1.260.000.000	1.435.998.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah (tercatat sebagai aset)	1.575.000.000	1.793.688.000	1.725.000.000	1.632.467.400	94,64	1.225.306.000	4.651.461.400	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		1.575.000.000	1.793.688.000	1.725.000.000	1.632.467.400	94,64	1.225.306.000	4.651.461.400	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat	300.000.000	260.000.000	300.000.000	243.664.192	81,22	150.000.000	653.664.192	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000	260.000.000	300.000.000	243.664.192	81,22	150.000.000	653.664.192	

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar tahun 2021 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang ditetapkan. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian target dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar tahun 2021 yaitu secara umum untuk belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 195.528.362.000,- terealisasi Rp. 162.985.949.129 atau (83,36%), dipergunakan untuk membiayai 16 program dan 29 kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas dan fungsinya terdiri atas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan OPD. Secara lengkap rekapitulasi Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar disajikan dalam Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2.1.

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

No	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2021				Tahun Terakhir RPJMD (2023)		
				Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1) Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	70	69	98,57	Sangat Tinggi	72	95,83	Belum Tercapai
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2) Persentase Penduduk Atau Rumah Tangga, Yang Terlayani Jaringan Air Minum	%	93	94,4	101,51	Sangat Tinggi	95	99,37	Belum Tercapai
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3) Cakupan Layanan Ipal (Jumlah Yang Terlayani Dibanding Seharusnya)	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	97	97,94	Belum Tercapai
		4) Persentase Penduduk Atau Rumah Tangga, Yang Terlayani Jaringan IPAL	%	95	100	105,26	Sangat Tinggi	97	103,09	Sudah Tercapai
4.	Program Pengembangan Permukiman	5) Laju perkembangan luasan permukiman	%	60	62	103,33	Sangat Tinggi	70	88,57	Belum Tercapai
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	6) Persentase bangunan gedung yang memenuhi peraturan	%	50	51	101,96	Sangat Tinggi	55	92,69	Belum Tercapai
6.	Program Penyelenggaraan Jalan	7) Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	86	82,12	95,49	Sangat Tinggi	88	93,32	Belum Tercapai
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	8) Persentase penyedia jasa konstruksi yang baik (sehat)	%	81	81	100,00	Sangat Tinggi	83	97,59	Belum Tercapai
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	9) Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	81	77	95,06	Sangat Tinggi	83	92,77	Belum Tercapai

Tabel 2.2.2.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2021				Tahun Terakhir RPJMD (2023)		
				Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Pengembangan Perumahan	1) Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,3	0,95	317,64	Sangat Tinggi	0,4	238,23	Sudah Tercapai
2.	Program Kawasan Permukiman	2) Persentase Peningkatan Penataan Permukiman	%	70	74	105,71	Sangat Tinggi	75	98,67	Belum Tercapai
3.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3) Persentase Pengurangan Permukiman Kumuh	%	18,84	19,76	104,88	Sangat Tinggi	61,73	32,01	Belum Tercapai
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	4) Persentase PSU Yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah (Tercatat Sebagai Aset)	%	40	57	142,50	Sangat Tinggi	45	126,67	Sudah Tercapai

Tabel 2.2.3.
Capaian Indikator tujuan dan sasaran OPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

No	Indikator Tujuan OPD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2021				Tahun Akhir RPJMD (2023)		
				Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pekerjaan Umum		%	85	86,08	101,27	Sangat Tinggi	87	98,77	Belum Tercapai
2.	Persentase Kawasan Kumuh		%	0,84	0,82	102,44	Sangat Tinggi	0,39	47,31	Belum Tercapai
		1) Cakupan layanan air minum	%	93	94,4	101,51	Sangat Tinggi	95	99,37	Belum Tercapai
		2) Cakupan layanan sanitasi	%	95	96,2%	101,26	Sangat Tinggi	97	99,18	Belum Tercapai
3.	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan		%	81	77	95,06	Sangat Tinggi	83	92,77	Belum Tercapai
		3) Persentase jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang sesuai peraturan	%	81	77	95,06	Sangat Tinggi	83	92,77	Belum Tercapai
4.	Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pemerintahan		%	50	51	102,00	Sangat Tinggi	55	92,73	Belum Tercapai
		4) Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	50	51	102,00	Sangat Tinggi	55	92,73	Belum Tercapai
5.	Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi		%	78	75,56	96,87	Sangat Tinggi	80	94,45	Belum Tercapai
		5) Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab	%	86	82,12	95,49	Sangat Tinggi	88	93,32	Belum Tercapai
		6) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	70	69	98,57	Sangat Tinggi	72	95,83	Belum Tercapai

Tabel 2.2.4.
Capaian Indikator tujuan dan sasaran OPD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Indikator Tujuan OPD)	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2021				Tahun Akhir RPJMD (2023)		
				Target	Capaian	%	Status	Target	%	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase Kawasan Kumuh		%	0,84	0,82	102,44	Sangat Tinggi	0,39	47,31	Belum Tercapai
		1) Persentase penanganan RTLH	%	4,32	4,71	109,03	Sangat Tinggi	4,78	98,54	Belum Tercapai
		2) Persentase jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU	%	40	57	142,50	Sangat Tinggi	45	126,67	Sudah Tercapai

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, beberapa jenis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar antara lain :

- 1) Pelayanan di bidang Sumber Daya Air yang meliputi penanganan banjir / genangan, perkuatan tebing tanah sungai / parit / saluran, pembangunan konstruksi saluran pemeliharaan, perbaikan, penggantian konstruksi saluran irigasi ;
- 2) Pelayanan di bidang Bina Marga yang berupa penanganan pembangunan jalan kabupaten ;
- 3) Pelayanan di bidang cipta karya yang meliputi :
 - Air bersih meliputi penambahan kapasitas dan jaringan air bersih.
 - Air limbah, seperti penambahan kapasitas pelayanan sanitasi berupa sanitasi komunal.
 - Penanganan bangunan gedung pemerintah:
 - Pelayanan dalam pengembangan jasa konstruksi seperti Penyelenggaraan pelatihan jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Pelayanan di bidang Tata Ruang meliputi Penyediaan data dan informasi penataan ruang serta penyediaan dasar hukum dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 5) Pelayanan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi penanganan RTLH, PSU dan Pemakaman;
- 6) Pelayanan di UPT Wilayah Kecamatan meliputi pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin irigasi;
- 7) Pelayanan di UPT alat berat meliputi Penyewaan Alat Berat.

Disamping itu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memberikan pelayanan lainnya seperti :

1. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
2. Rekomendasi jembatan, bangunan, dan penebangan pohon.
3. Sosialisasi / Pelatihan Jasa Konstruksi dan peraturan tata ruang.
4. Bimbingan Teknis Gambar Situasi.
5. Informasi Tata Ruang

Dalam penyelenggaraan urusan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

1. Bidang Sumber Daya Air

- 1) Belum optimalnya Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air
- 2) Masih banyaknya sarana prasarana pengairan dalam kondisi sedang dan rusak berat.
- 3) Masih terbatasnya biaya baik untuk pembangunan, rehabilitasi maupun operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.
- 4) Perlunya data base sistem pengairan yang terintegrasi.
- 5) Masih lemahnya peran kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air.
- 6) Belum tersedianya masterplan drainase Kota.

2. Bidang Bina Marga.

- 1) Kurang optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan dana.
- 2) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merawat sarana infrastruktur bidang bina marga.
- 3) Masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap beban muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
- 4) Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan dan perijinan pemanfaatan ruang jalan.

3. Bidang Cipta Karya.

- 1) Sebagian besar warga mempergunakan air sumur tradisional untuk dikonsumsi ;
- 2) Belum semua warga bisa mendapat pasokan air bersih ;
- 3) Kapasitas produksi air bersih oleh PDAM masih terbatas
- 4) Tangki septik rumah warga berdekatan dengan sumber air (sumur);
- 5) Antara saluran irigasi dan drainase belum terpisahkan.

4. Bidang Tata Ruang.
 - 1) Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.
 - 2) Belum jelasnya kebijakan insentif-desinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang
 - 3) Belum optimalnya kinerja kelembagaan bidang penataan ruang.
 - 4) Belum optimalnya sistem informasi penataan ruang.
 - 5) Belum Tersedianya masterplan tata ruang.

5. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - 1) Belum optimalnya system pendataan PSU
 - 2) Masih banyak pengembang yang tidak menyerahkan PSU ke Penmerintah Kabupaten
 - 3) Alokasi pembiayaan yang masih rendah

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, antara lain:

1. Penataan dan pelebaran jalan untuk menambah kapasitas jalan yang banyak terkena lahan warga. Hal ini memerlukan penanganan khusus dari beberapa instansi dan pendekatan yang baik kepada masyarakat untuk keberhasilannya.
2. Disamping pembangunan konstruksi saluran dan sistem jaringan drainase serta pemeliharaan yang terus-menerus, masih juga diperlukan pemantauan area genangan apabila terjadi hujan lebat pada saat hujan, yaitu untuk mencari solusi pengaliran air yang efektif ke sistem jaringan drainase yang ada. Demikian pula pada upaya penggusuran rumah-rumah warga yang berada di sepanjang jaringan primer atau di muara-muara parit, terutama yang menyebabkan penyempitan aliran air memerlukan koordinasi yang serius dan biaya yang cukup besar.
3. Rencana tata ruang wilayah belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang.
4. Terdapat perubahan peruntukan zoning Ruang Terbuka Hijau yang dikuasai oleh masyarakat di alihkan menjadi Kawasan permukiman.
5. Penggunaan sistem sanitasi yang baik dan benar masih jauh dari ideal. Belum ada sistem jaringan khusus air limbah dan sistem pengolahan air limbah, baik pada rumah tangga, maupun secara kolektif / komunal.

1. Kondisi sistem kerja, pendataan, pengolahan dan pengarsipan informasi yang semakin kompleks, dan kebutuhan data-data aktual semakin tinggi belum dikelola secara terpadu dan terpusat, sehingga ini mempengaruhi terhadap kelancara pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Belum terhubungnya jalan-jalan lingkungan secara merata yang mempengaruhi kepadatan lalu lintas menumpuk pada ruas jalan tertentu.
3. Belum semua jalan utama dilengkapi dengan trotoar yang memadai, sehingga mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki.
4. Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan.
5. Sering terjadi genangan pada saat hujan karena faktor permukaan tanah dan sistem drainase yang belum sempurna.
6. Kebiasaan warga membuang sampah di saluran / got / parit dan penempatan tempat pembuangan sampah dipinggir parit mempengaruhi terjadinya pendangkalan dan penyumbatan saluran air.
7. Belum terintegrasinya sistem drainase yang menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal.
8. Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi / pemeliharaan menjadi tinggi.
9. Terjadi penyempitan pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai / saluran akibat pembangunan oleh warga melanggar GSS di kawasan bantaran sungai / saluran.
10. Kegiatan Penurapan yang ada pada saluran drainase belum seluruhnya tertangani, sehingga berpotensi mudah menyebabkan terjadinya sedimentasi.
11. Penyediaan layanan air bersih belum mampu menjangkau seluruh kawasan kota/rumah tangga.
12. Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
13. Kurangnya regulasi meliputi norma, standar, prosedur dan kriteria pemanfaatan ruang, sehingga masih diperlukan adanya rencana detail tata ruang kawasan strategis.
14. Belum terakomodirnya nilai-nilai fiolosofi sejarah, kebudayaan dan kearifan lokal dalam konsep penataan kawasan kota.

15. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota untuk penempatan fungsi penampungan dan pengolahan sampah; pemrosesan air limbah rumah tangga dan lingkungan; serta fungsi dan jaringan infrastruktur lainnya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan Renstra, menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Rancangan awal Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar tahun 2023 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Karanganyar dan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD dengan 16 nomenklatur program sebagai berikut :

1. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
5. Program Pengembangan Permukiman.
6. Program Penataan Bangunan Gedung.
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.
8. Program Penyelenggaraan Jalan.
9. Program pengembangan Jasa konstruksi.
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
11. Program Pengembangan Perumahan.
12. Program Kawasan Permukiman.
13. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
15. Program Penatagunaan Tanah.
16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar disajikan dalam Tabel 2.4. di bawah ini.

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan													
Kode Rekening		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting						
1		2		3	4		5	6	7	8	9		10	11	12				
	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Lap			10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Lap		15.000.000		
	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Lap	7		15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Lap	7		15.000.000	
1	03	01	2,02		Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah		Jangka waktu penyelenggara keuangan perangkat daerah	Bulan	12		16.341.230.000	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah		Jangka waktu penyelenggara keuangan perangkat daerah	bulan	12		16.034.886.344	
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		16.291.230.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		16.291.230.000	
1	03	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Bulan	12			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Bulan	12			
1	03	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jangka waktu pelaksanaan akuntansi SKPD	Bulan	12		10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jangka waktu pelaksanaan akuntansi SKPD	Bulan	12		10.000.000	
1	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulan	1		10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulan	1		10.000.000	
1	03	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jangka Waktu Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bulan	12		10.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jangka Waktu Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bulan	12		10.000.000	
1	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD		Jangka Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan	12		10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD		Jangka Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Bulan	12		10.000.000	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan										
Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	03	01	2,03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah		Jangka waktu pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	bulan	12	75.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	ASN	12	75.000.000	
1	03	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	kegiatan			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	kegiatan			
1	03	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kegiatan			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	kegiatan			
1	03	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Jumlah kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	kegiatan	12	75.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	kegiatan	12	75.000.000	
1	03	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	ASN	185	35.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	ASN	185	35.000.000	
1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel			
1	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jangka waktu pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	bulan	12	15.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jangka waktu pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	bulan	12	15.000.000	
1	03	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jangka waktu sistem informasi kepegawaian yang dikelola	bulan			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jangka waktu sistem informasi kepegawaian yang dikelola	bulan			

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan												
Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting		
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	
1	03	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	kali	12	20.000.000		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	kali	12	20.000.000	
1	03	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat formal	Orang				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat formal	Orang			
1	03	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan				
1	03	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah)	Bulan	12	480.000.000		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah)	Bulan	12	480.000.000	
1	03	01	2,06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor	Bulan	12	50.000.000		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor	Bulan	12	50.000.000	
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan	unit	12			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan	unit	12		
1	03	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	unit				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	unit			
1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor		Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12			Penyediaan Bahan Logistik kantor		Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12		
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	80.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	80.000.000	
1	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan										
Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jangka waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jangka waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	350.000.000	
1	03	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jangka waktu dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Bulan	12		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jangka waktu dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Bulan	12		
1	03	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Unit	12	10.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Unit	12	10.000.000	
1	03	01	2,07	03	Pengadaan alat besar		Jumlah unit pengadaan alat besar	Unit			Pengadaan alat besar		Jumlah unit pengadaan alat besar	Unit			
1	03	01	2,07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah unit pengadaan alat mebel	unit			Pengadaan Mebel		Jumlah unit pengadaan alat mebel	unit			
1	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	1	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	1	10.000.000	
1	03	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah unit pengadaan aset tetap lainnya	unit			Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah unit pengadaan aset tetap lainnya	unit			
1	03	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit pengadaan sarana dan sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit			Pengadaan sarana dan sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit pengadaan sarana dan sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit			
1	03	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	584.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	1.483.858.000	
1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	87.300.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan											
Kode Rekening		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting				
1		2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12			
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik		Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bulan	12	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik		Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bulan	12	316.596.000	
1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	424.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.079.962.000	
1	03	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit	24	133.168.543	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	584.000.000	
1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasinal atau lapangan yang dipelihara	Unit	25	100.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	10.000.000	
1	03	01	2,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah alat besar yang dipelihara	Unit			Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik		Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	150.000.000	
1	03	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	5	10.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	424.000.000	
1	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit	24	133.168.543	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan										
Kode Rekening		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting			
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			
1	03	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	5	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	25	100.000.000	
1	03	01	2,09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	13.168.543	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	Unit		13.168.543	
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%		6.588.186.000	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%		6.588.186.000	
1	03	02	2,01		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase panjang fungsi saluran yang dipelihara	%		150.000.000	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang fungsi saluran yang dipelihara	%		150.000.000	
1	03	02	2,01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		Jangka waktu Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Bulan	12	150.000.000	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jangka waktu Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Bulan	12	150.000.000	
1	03	02	2,02		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasannya diBawah 1000 Ha dalam 1(qsatu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase panjang fungsi saluran yang dibangun	%		6.438.186.000	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasannya diBawah 1000 Ha dalam 1(qsatu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang fungsi saluran yang dibangun	%		6.438.186.000	

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	03	02	2,02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun	Paket	10	2.000.000.000	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun	Paket	10	2.000.000.000	
1	03	02	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah Jaringan Irigasi yang direhabilitasi	Paket	6	3.728.186.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Jumlah Jaringan Irigasi yang direhabilitasi	Paket	6	3.728.186.000	
1	03	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Jangka waktu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Bulan	12	710.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Jangka waktu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Bulan	12	710.000.000	
1	03	03			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Persentase Jumlah Penduduk / Rumah Tangga yang terlayani jaringan air bersih	%	100,00	8.168.772.000	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Persentase Jumlah Penduduk / Rumah Tangga yang terlayani jaringan air bersih	%	100,00	8.168.772.000	
1	03	03	2,01		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan	%	100,00	8.168.772.000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan	%	100,00	8.168.772.000	
1	03	03	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Tersedianya dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	dokumen		614.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Tersedianya dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	dokumen		614.000.000	
1	03	03	2,01	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Panjang pipa yang dibangun dalam rangka pelaksanaan pembangunan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	M		7.554.772.000	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Panjang pipa yang dibangun dalam rangka pelaksanaan pembangunan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	m		7.554.772.000	
1	03	03	2,01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Panjang pipa yang dibangun dalam rangka peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	M			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Panjang pipa yang dibangun dalam rangka peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	m			

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	03	03	2,01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Panjang pipa yang dibangun dalam rangka perluasan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	M			Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Panjang pipa yang dibangun dalam rangka perluasan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	m			
1	03	03	2,01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan		Terlaksananya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Keg			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan		Terlaksananya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	keg			
1	03	05			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Persentase jumlah penduduk/RT yang dilayani sanitasi	%	91,96	5.083.429.000	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Persentase jumlah penduduk/RT yang dilayani sanitasi	%	91,96	5.083.429.000	
1	03	05	2,01		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah penduduk/RT yang dilayani sanitasi	%	91,96	5.083.429.000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah penduduk/RT yang dilayani sanitasi	%	91,96	5.083.429.000	
1	03	05	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terdatanya sanitasi terdiri data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	dokumen			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terdatanya sanitasi terdiri data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	dokumen			
1	03	05	2,01	05	Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala Permukiman		Tersedianya Lokasi Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala Permukiman	Lokasi			Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala Permukiman		Tersedianya Lokasi Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala Permukiman	Lokasi			

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	03	05	2,01	06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Tersedianya septitanc dengan bofilter terdiri data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD s dan SPALD T	SR			Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Tersedianya septitanc dengan bofilter terdiri data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD s dan SPALD T	SR			
1	03	05	2,01	11	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		Tersedianya Lokasi penyediaan septitanc dengan bofilter dalam rangka pelaksanaan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Lokasi			Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		Tersedianya Lokasi penyediaan septitanc dengan bofilter dalam rangka pelaksanaan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Lokasi			
1	03	05	2,01	12	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Tersedianya lokasi Pembangunan / Penyediaan sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala permukiman	Lokasi		5.083.429.000	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Tersedianya lokasi Pembangunan / Penyediaan sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala permukiman	Lokasi		5.083.429.000	
1	03	05	2,01	16	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Tersedianya Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kegiatan			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Tersedianya Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kegiatan			

Kode Rekening				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting		
1				2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12		
1	03	06				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	50,00	20.700.000.000	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	50,00	20.700.000.000	
1	03	06	2,01			Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara Yang berfungsi baik	%	50,00	20.700.000.000	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara Yang berfungsi baik	%	50,00	20.700.000.000	
1	03	06	2,01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah dokumen tentang Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	dok			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah dokumen tentang Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	dok			
1	03	06	2,01	06		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		Jumlah Panjang saluran drainase dan koker yang ditingkatkan dengan baik	m			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		Jumlah Panjang saluran drainase dan koker yang ditingkatkan dengan baik	m			
1	03	06	2,01	07		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		Panjang sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang direhabilitasi	m	100	100.000.000	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		Panjang sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang direhabilitasi	m	100	100.000.000	
1	03	06	2,01	09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Panjang drainase yang dipelihara	m			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Panjang drainase yang dipelihara	m			
1	03	07				Program Pengembangan Permukiman		Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan Pemukiman	%	100,00%		Program Pengembangan Permukiman		Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan Pemukiman	%	100,00%		
1	03	07	2,01			Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman di kawasan strategis kota	%	100,00%		Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman di kawasan strategis kota	%	100,00%		

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	03	07	2,01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	kegiatan			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	kegiatan			
1	03	08			Program Penataan Bangunan Gedung		Persentase capaian penataan bangunan gedung dan pelaksanaan kegiatan penataan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik serta pemberian IMB dan SLF bangunan gedung	%	100,00	3.150.000.000	Program Penataan Bangunan Gedung		Persentase capaian penataan bangunan gedung dan pelaksanaan kegiatan penataan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik serta pemberian IMB dan SLF bangunan gedung	%	100,00	3.150.000.000	
1	03	08	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Persentase peningkatan layanan penyelenggaraan bangunan gedung	%	100,00	3.150.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Persentase peningkatan layanan penyelenggaraan bangunan gedung	%	100,00	3.150.000.000	
1	03	08	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah bangunan gedung yang mendapatkan pelayanan penerbitan IMB, SLF, peran TABG serta implementasi SIMBG	unit		150.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah bangunan gedung yang mendapatkan pelayanan penerbitan IMB, SLF, peran TABG serta implementasi SIMBG	unit		150.000.000	

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	03	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik yang direncanakan, dibangun, dan diawasi kegiatan pembangunannya	unit		3.000.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik yang direncanakan, dibangun, dan diawasi kegiatan pembangunannya	unit		3.000.000.000	
1	03	09			Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		Persentase peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak	%			Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		Persentase peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak	%			
1	03	09	2,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian peningkatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	%			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian peningkatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	%			
1	03	09	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dan Penataan GSB - RMJ	dokumen			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dan Penataan GSB - RMJ	dokumen			
1	03	09	2,01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jangka waktu capaian pelaksanaan supervisi penataan / pemeliharaan bangunan dan lingkungan	bulan			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jangka waktu capaian pelaksanaan supervisi penataan / pemeliharaan bangunan dan lingkungan	bulan			
1	03	09	2,01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Lokasi bangunan dan lingkungan yang ditata	lokasi			Penataan Bangunan dan Lingkungan		Lokasi bangunan dan lingkungan yang ditata	lokasi			

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan		Persentase penambahan kinerjajalan kota	%	2,00	39.222.714.000	Program Penyelenggaraan Jalan		Persentase penambahan kinerjajalan kota	%	2,00	39.222.714.000	
1	03	10	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	%	2,00	39.222.714.000	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	%	2,00	39.222.714.000	
1	03	10	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen perencanaan Teknis jalan dan jembatan	dok	8	770.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen perencanaan Teknis jalan dan jembatan	dok	8	770.000.000	
1	03	10	2,01	03	Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah dokumen berisidata legger jalan yang dikelola	dok	1		Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah dokumen berisidata legger jalan yang dikelola	dok	1		
1	03	10	2,01	04	Survei Kondisi Jalan /Jembatan		Jumlah dokumen berisidata kondisi jalan / jembatan yang terverifikasi / LHR / Updating peta jaringanjalan IGT	dok	2		Survei Kondisi Jalan /Jembatan		Jumlah dokumen berisidata kondisi jalan / jembatan yang terverifikasi / LHR / Updating peta jaringanjalan IGT	dok	2		
1	03	10	2,01	05	Pembangunan Jalan		Jumlah panjang jalanbaru yang dibangun	m	1.500	3.000000000	Pembangunan Jalan		Jumlah panjang jalanbaru yang dibangun	m	1.500	3.000000000	
1	03	10	2,01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar		Bertambahnya panjang ruas jalan yang memenuhi lebar standar	m			Pelebaran Jalan Menuju Standar		Bertambahnya panjang ruas jalan yang memenuhi lebar standar	m			
1	03	10	2,01	08	Rekonstruksi Jalan		Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi / ditingkatkan	m		8.288.303.000	Rekonstruksi Jalan		Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi / ditingkatkan	m		8.288.303.000	
1	03	10	2,01	09	Rehabilitasi Jalan		Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	m		75.000.000	Rehabilitasi Jalan		Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	m		75.000.000	
1	03	10	2,01	10	Pemeliharaan BerkalaJalan		Jumlah Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	m		22.289.411.000	Pemeliharaan BerkalaJalan		Jumlah Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	m		22.289.411.000	

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan		Jumlah Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	m		4.800.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan		Jumlah Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	m		4.800.000.000	
1	03	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang dibangun	unit			Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang dibangun	unit			
1	03	10	2,01	16	Penggantian Jembatan		Jumlah Jembatan yang Diganti	unit			Penggantian Jembatan		Jumlah Jembatan yang diganti	unit			
1	03	10	2,01	18	Rehabilitasi Jembatan		Jumlah jembatan yang direhabilitasi	unit			Rehabilitasi Jembatan		Jumlah jembatan yang direhabilitasi	unit			
1	03	10	2,01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan		Jumlah dokumen Laporan Akhir Pengawasan Teknis Jalan / Jembatan / Trotoar	dok			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan		Jumlah dokumen Laporan Akhir Pengawasan Teknis Jalan / Jembatan / Trotoar	dok			
1	03	11			Program pengembangan jasa konstruksi		Persentase capaian pengembangan jasa konstruksi	%	100	75.000.000	Program pengembangan jasa konstruksi		Persentase capaian pengembangan jasa konstruksi	%	100	75.000.000	
1	03	11	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah peserta tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Peserta	50	50.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah peserta tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Peserta	50	50.000.000	
1	03	11	2,01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Peserta Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Peserta	50	50.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Peserta Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Peserta	50	50.000.000	
1	03	11	2,02		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Keg			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Keg			
1	03	11	2,02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi		Jumlah dokumen Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dok			Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi		Jumlah dokumen Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dok			

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	03	11	2,04		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah pengawasan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja(K.3) pada proyek	Keg	1	25.000.000	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah pengawasan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja(K.3) pada proyek	Keg	1	25.000.000	
1	03	11	2,04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Peserta	50	25.000.000	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Peserta	50	25.000.000	
1	03	12			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase capaian penyelenggaraan tata ruang	%	96,89	1.544.000.000	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase capaian penyelenggaraan tata ruang	%	96,89	1.544.000.000	
1	03	12	2,01		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota		Persentase capaian pemanfaatan ruang daerah yang baik dan benar	%	96,89	1.344.000.000	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota		Persentase capaian pemanfaatan ruang daerah yang baik dan benar	%	96,89	1.344.000.000	
1	03	12	2,01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Peraturan Bupati dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang sesuai amanat RTRW/RDTR	Dok	2	1.344.000.000	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Peraturan Bupati dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang sesuai amanat RTRW/RDTR	Dok	2	1.344.000.000	
1	3	12	2,04		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase capaian peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian ruang di Kota Pontianak	%	100,00	200.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase capaian peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian ruang di Kota Pontianak	%	100,00	200.000.000	
1	3	12	2,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan penataan ruang	dokumen	5	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan penataan ruang	dokumen	5	200.000.000	

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	04	02			Program Pengembangan Perumahan		Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota yang tertangani	%	96,89	270.000.000	Program Pengembangan Perumahan		Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota yang tertangani	%	96,89	270.000.000	
1	04	02	2,01		Kegiatan Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota		Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota yang terdata	%	96,89	50.000.000	Kegiatan Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota		Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota yang terdata	%	96,89	50.000.000	
1	04	02	2,01	05	Pendataan dan verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dok		50.000.000	Pendataan dan verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dok		50.000.000	
1	04	02	2,03		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota		Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota yang dibangun dan direhab	%	96,89	220.000.000	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota		Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota yang dibangun dan direhab	%	96,89	220.000.000	
1	04	02	2,03	01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	Unit		120.000.000	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	Unit		120.000.000	
1	04	02	2,03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersusun	Dok		100.000.000	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersusun	Dok		100.000.000	

Kode Rekening				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
1				2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	
1	04	03				Program Kawasan Permukiman		Persentase peningkatan penataan permukiman		1.911.649.000		Program Kawasan Permukiman		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		1.911.649.000	
1	04	03	2,02			Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata				Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata			
1	04	03	2,02	08		Penyusunan / Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Operasional Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kegiatan			Penyusunan / Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Operasional Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kegiatan		
1	04	03	2,03			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		1.911.649.000		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		1.911.649.000	
1	04	03	2,03	01		Penyusunan Renca Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kegiatan	50.000.000		Penyusunan Renca Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kegiatan	50.000.000	
1	04	03	2,03	02		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Unit	1.761.649.000		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Unit	1.761.649.000	
1	04	03	2,03	03		Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Jumlah Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kegiatan			Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Jumlah Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kegiatan		
1	04	03	2,03	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kegiatan	100.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kegiatan	100.000.000	

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	04	04			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Persentase pengurangan permukiman kumuh			240.000.000	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Persentase pengurangan permukiman kumuh			240.000.000	
1	04	04	2,02		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten . Kota		Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten . Kota Menurun			240.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten . Kota		Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten . Kota Menurun			240.000.000	
1	04	04	2,02	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Operasional Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kegiatan		240.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Operasional Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kegiatan		240.000.000	
1	04	04	2,02	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Operasional Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kegiatan			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Operasional Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kegiatan			
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah (tercatat sebagai aset)			1.542.000.000	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah (tercatat sebagai aset)			1.542.000.000	
1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase Penyediaan PSU Perumahan			1.542.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase Penyediaan PSU Perumahan			1.542.000.000	

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	04	05	2,01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Operasional Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kegiatan		100.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Operasional Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kegiatan		100.000.000	
1	04	05	2,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Operasional Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kegiatan		1.402.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Operasional Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kegiatan		1.402.000.000	
1	04	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kegiatan		40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kegiatan		40.000.000	
2	10	10			Program Penatagunaan Tanah		Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat			100.000.000	Program Penatagunaan Tanah		Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat			100.000.000	
2	10	10	2,01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten		Persentases Penggunaan Tanah milik pemerintah			100.000.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten		Persentases Penggunaan Tanah milik pemerintah			100.000.000	
2	10	10	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	Sertifikat	bidang	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten			100.000.000	
TOTAL										85.769.148.543							

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat RPJMD Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD.

Pada Tahun 2022 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, sesuai kriteria yang telah ditentukan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang merupakan hasil identifikasi kebijakan Nasional antara lain :

1. Meningkatkan jaringan jalan yang ada serta membangun jaringan jalan yang baru.
2. Menyediakan database pengendalian dan meningkatkan rasio jalan / jembatan berkondisi baik.
3. Optimalisasi dan integritas sistem drainase dan peningkatan kapasitas dan kondisi saluran.
4. Mengendalikan genangan dan banjir.
5. Pengadaan peralatan kerja sesuai kebutuhan dan pemeliharaan kondisi peralatan kerja.
6. Perluasan, penataan dan pemeliharaan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan.
7. Penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah, dsb.
8. Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan (pembangunan jalan dan drainase lingkungan, bantuan material jalan lingkungan, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih)
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi.
10. Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator keberhasilan RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023 serta dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, dimana misi yang menjadi urusan Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar adalah misi pertama yaitu “Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh”, maka dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran yang menjadi urusan Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar, yaitu :

Tujuan :

Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya infrastruktur jalan
2. Meningkatnya infrastruktur irigasi
3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan
4. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang
6. Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik

3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diprioritaskan untuk meningkatkan keterjangkauan wilayah dengan sarpras yang baik, terutama yang mendukung pengembangan ekonomi desa dan meningkatkan produksi pertanian dan pariwisata, meningkatkan sarana prasarana perkantoran (Gedung kantor dan fasilitas public), dengan program prioritas dan rencana pendanaan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
 - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 - 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 - 1) Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota
7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - 2) Pengawasan Tertib Usaha
11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 - 1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota
 - 2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota

- 3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
- 4) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

12. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Kabupaten/Kota

13. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- 1) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha
- 2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha

14. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

- 1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

15. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

- 1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

16. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

- 1) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar mengajukan usulan sebanyak 13 program, 26 kegiatan dan 68 sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 85.769.148.543-. Adapun rincian adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.1.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	73	17.773.398.543	DPUPR
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Irigasi dalam kondisi baik	%	72	6.588.186.000	DPUPR
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk atau rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	%	95	8.168.772.000	DPUPR
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM	Cakupan layanan IPAL (Jumlah yang terlayani disbanding yang seharusnya)	%	97	5.083.429.000	DPUPR
		Persentase penduduk atau rumah tangga yang terlayani jaringan jaringan IPAL	%	97		
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran dalam kondisi baik	%	72	100.000.000	DPUPR
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan Gedung yang memenuhi peraturan	%	55	3.150.000.000	DPUPR
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	88	39.222.714.000	DPUPR
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penyedia jasa konstruksi yang baik (sehat)	%	83	75.000.000	DPUPR
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	83	1.544.000.000	DPUPR
JUMLAH					81.705.499.543	

Sedangkan Program/Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diprioritaskan untuk mengurangi Kawasan kumuh, mengurangi rumah tidal layak huni (RTLH), meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman, dan pemenuhan standar areal pemakaman, dengan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Program dan Perkiraan Pendanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	USULAN PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,4	270.000.000	DPUPR
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan penataan permukiman	%	75	1.911.649.000	DPUPR
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pengurangan permukiman kumuh	%	61,73	240.000.000	DPUPR
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah (tercatat sebagai asset)	%	45	1.542.000.000	DPUPR
JUMLAH					3.963.649.000	

BAB V PENUTUP

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja Tahun 2023 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Karanganyar.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

